

# LAPORAN KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2025



**KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA APBD) Tahun Anggaran 2025, serta Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan merupakan bentuk akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, koordinasi dan melaksanakan peningkatan hubungan partai politik, fasilitasi pemilu dan hubungan organisasi kemasyarakatan dan LSM.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,

- perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah;
  5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, pemantauan situasi serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah daerah; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **B. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo terdiri dari Sekretariat dan 3 (tiga) bidang antara lain:

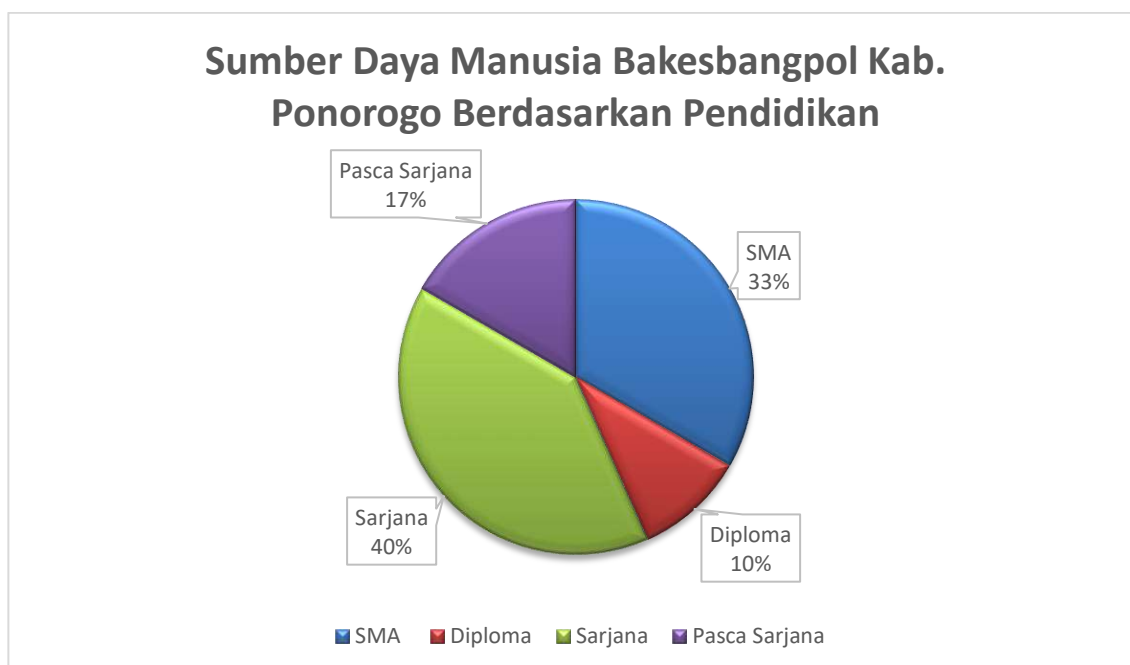
1. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.
2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

# STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PONOROGO



### C. Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup beragam. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo sebanyak 29 orang dan pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK Paruh Waktu) sebanyak 1 (satu), terdiri dari 10 orang Perempuan (10%) dan 20 orang laki-laki (20%). Sedangkan berdasarkan pendidikan, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo terdiri dari jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sejumlah 10 (sepuluh), jenjang Diploma (D3) sejumlah 3 orang, jenjang Sarjana (S-1 /D-IV) sejumlah 12 orang, dan jenjang Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 5 orang.



## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

#### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan tahun 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**

**Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya etika dan budaya politik	Prosentase Pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan	100%
2.	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Prosentase Pencairan Hibah kepada Ormas Penerima Hibah	100%

#### B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2**

**Skala Pengukuran Capaian Kinerja**

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
3	75 % sampai dengan 100 %	Berhasil

2	55 % sampai dengan 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja Kepala Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Capaian Kinerja Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1.	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan	100%	100%
2.	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Pencairan Hibah kepada Ormas Penerima Hibah	100%	100%

**C. Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Sasaran meningkatnya etika dan budaya politik memiliki indikator kinerja persentase pencairan dana bantuan keuangan kepada partai politik penerima bantuan keuangan memiliki target 100%. Capaian tahun 2025 terhadap target tersebut adalah 100% dan masuk kategori **Berhasil**. Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan adanya dukungan perencanaan yang baik serta adanya koordinasi yang baik dengan pengurus Partai Politik serta adanya komitmen yang tinggi dari semua jajaran pimpinan sampai dengan level staf untuk memperbaiki kinerjanya.

Sasaran meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan memiliki indikator persentase pencairan hibah kepada ormas penerima hibah memiliki target 100% dan masuk kategori **Berhasil**. Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan adanya dukungan perencanaan yang baik serta adanya koordinasi yang baik dengan ormas penerima hibah serta adanya komitmen yang tinggi dari semua jajaran pimpinan sampai dengan level staf untuk memperbaiki kinerjanya.

#### **D. Rencana Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang adalah:

1. Melaksanakan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengurus Parpol Dalam rangka untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik;
2. Melaksanakan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan;
3. Sebagai upaya untuk mengatasi belum tersedianya petunjuk teknis resmi pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tingkat kabupaten/kota, maka salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan akademisi dalam rangka asistensi pengukuran IDI. Kerja sama dengan kalangan akademisi dipandang strategis karena akademisi memiliki kapasitas keilmuan, metodologi, serta Sebagai upaya untuk mengatasi belum tersedianya petunjuk teknis resmi pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di tingkat kabupaten/kota, maka salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan akademisi dalam rangka asistensi pengukuran IDI. Kerja sama dengan kalangan akademisi dipandang strategis karena akademisi memiliki kapasitas keilmuan, metodologi, serta pengalaman penelitian yang relevan dengan pengukuran indikator demokrasi. Melalui keterlibatan akademisi, pemerintah daerah dapat memperoleh pendampingan dalam memahami konsep, dimensi, dan indikator IDI secara lebih komprehensif, meskipun belum terdapat juknis resmi dari pemerintah pusat untuk tingkat kabupaten/kota. Asistensi yang diberikan oleh akademisi dapat mencakup penyusunan kerangka pengukuran internal, pemetaan indikator IDI yang relevan dengan kewenangan kabupaten/kota, serta penguatan kapasitas aparatur daerah dalam pengumpulan dan pengolahan data. Dengan demikian, pemerintah daerah tetap dapat melakukan pengukuran dan evaluasi kondisi demokrasi secara terarah sebagai bahan perbaikan kebijakan, tanpa harus menunggu kebijakan formal dari pusat.

## E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Sosial Politik menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG	
	Laporan Kurang Baik
	Laporan Sudah Baik
	Laporan Diperbaiki
	Laporan Diteliti Ulang
	Capaian Diteliti Ulang
	Lain – Lain (Ditulis tangan oleh Atasan Langsung)
	<p>Berdasarkan Capaian Kinerja Indikator Kinerja dgn Capaian Kriteria Berhasil Terimakasih dan Mohon Dipertanyakan.</p>

## BAB III PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Bidang Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian rata-rata realisasi kinerja tahun 2025, sebesar (100%) masuk kategori **Berhasil**.

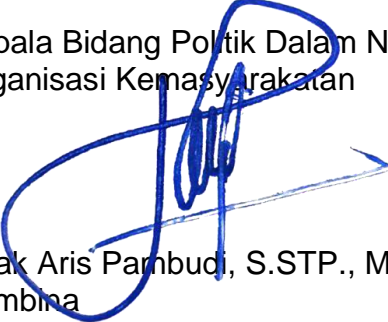
Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu meningkatkan kinerja di Bidang Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan rencana tindak lanjut.

Mengetahui,  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kabupaten Ponorogo

  
Dra. Besse Tenrisampeang, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP 196805121990092002

Ponorogo, 31 Desember 2025

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan  
Organisasi Kemasyarakatan

  
Jajak Aris Pambudi, S.STP., M.Si  
Pembina  
NIP 198705062006021002